

KERUKUNAN DAN HORMAT DALAM ETIKA JAWA

Mathius Tukan Panggelo

STF Driyarkara

mathius.tukan@driyarkara.ac.id

Received
30 November 2023

Revised
03 Desember 2023

Accepted
26 Desember 2023

Abstract

Javanese ethics is a combination of customs, worldview, values, and philosophy that is still very strong in Javanese society. Javanese ethics encompasses a moral life, where there is a conscience, and a sense of taste. Javanese ethics emphasises harmony that can be born from a process of acting in harmony and respect. The principle of harmony aims to maintain society in a state of harmony. Javanese pretence, "ethok-ethok", is a technique that aims to maintain harmony even though feelings to the contrary are hidden. Harmony can also be achieved through the principle of respect, by speaking and carrying oneself always showing respect according to degree and position. Through the qualitative method, the author found an analysis that ethok-ethok action is teleological ethics, lying so that others are not angry.

Key terms: *Javanese ethics, harmony, harmony, respect, pretence, ethok-ethok*

Abstrak

Etika Jawa merupakan perpaduan tentang adat-istiadat, pandangan hidup, nilai-nilai, dan filsafat yang masih sangat kental dalam masyarakat Jawa. Etika Jawa melingkupi hidup yang bermoral, di mana terdapatnya hati nurani, dan olah rasa. Etika Jawa menekankan keselarasan yang dapat lahir dari suatu proses tindakan rukun dan hormat. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Pura-pura dalam bahasa Jawa, *ethok-ethok* merupakan suatu teknik yang bertujuan menjaga kerukunan tetap ada meskipun perasaan sebaliknya disembunyikan. Selain kerukunan, keselarasan dapat pula dicapai melalui prinsip hormat, dengan cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat sesuai derajat dan kedudukan sembari menyadari diri dan orang lain. Melalui metode kualitatif, penulis menemukan analisis bahwa tindakan *ethok-ethok* adalah etika teleologis, berbuat bohong supaya orang lain tidak marah.

Kata Kunci: Etika Jawa, keselarasan, kerukunan, hormat, pura-pura, *ethok-ethok*

Pendahuluan

Dalam suatu kisah, diceritakan perbedaan antara orang Jawa dan orang Makassar. Ketika kaki orang Jawa diinjak, orang Jawa tersebut berkata kepada orang yang menginjaknya, “*nuwun sewu, kaki mas di atas kaki saya*”. Lalu ketika kaki orang Makassar diinjak, orang Makassar tersebut menyahut dengan konotasi keras “*Sikulu’, lihat-lihat ko kakimu*” (artinya “....., perhatikan kakimu” -titik-titik merupakan sebutan umpatan yang kasar bagi lawan bicara-). Cerita ini hanyalah fiksi, tidak ada maksud untuk meninggikan atau merendahkan orang atau budaya tertentu dan hanya merupakan pengantar dalam tulisan ini. Melalui cerita ini, yang ingin disampaikan bagaimana orang Jawa mengolah perasaannya sehingga perilaku dan tutur yang muncul memberikan keselarasan, meskipun ada tantangan yang dihadapinya.

Siapakah orang Jawa itu? Pengelompokan ke dalam orang Jawa bisa melalui penelusuran asal usulnya. Misalnya dapat ditemukan dalam keseharian, bilamana perantau yang datang ke Jakarta dan sekitarnya, jika hendak mudik mengatakan ‘pulang ke Jawa’. Terhadap hal ini, bagi orang luar Jawa akan mengatakan, ‘Jawa yang mana? Ini (Jakarta) kan juga Jawa’. Menurut Denys Lombard, Jawa terbagi menjadi tiga kelompok sosial-budaya yang besar, antara lain Tanah Pasundan (Jawa Barat), Tanah Jawa yang sebenarnya (Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta) dan Tanah Pesisir (lajur pantai dimana identitas Jawa dan Sunda mulai terkikis) (Lombard, 2005). Atau, orang Jawa dapat dilihat dari penggunaan bahasa Jawa yang sebenarnya dan umumnya dapat dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur (mungkin juga DI Yogyakarta)

(Lombard, 2005). Orang Jawa dalam penulisan ini adalah adalah mereka yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Dalam hal kelompok sosial, orang Jawa terdiri dari dua kelompok yakni *wong cilik* (orang kecil) yang secara umum adalah petani, dan kaum priyayi yakni para pegawai dan orang-orang intelektual. Sementara dari kelompok keagamaan, terdapat pula dua kategori yakni *abangan* atau Jawa Kejawen, yaitu mereka yang kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh tradisi-tradisi Jawa pra-Islam, dan santri yaitu mereka yang memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam (Geertz, 1960; Magnis-Suseno, 1984).

Etika Jawa merupakan keseimbangan batin dan kedalaman dimensi perasaannya dan tujuan itu tercapai lewat sikap yang tidak berputar pada dirinya sendiri (*sepi ing pamrih*) serta lewat partisipasi dalam kehidupan komunitas (*rame ing gawe*) (Magnis-Suseno, 1997). *Sepi ing pamrih* dapat dimaknai sebagai tindakan tidak menuntut jasa atau imbalan. Sementara *rame ing gawe* dimaknai sebagai tindakan yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Kedua tindakan ini merupakan proses pengembangan perasaan yang merupakan unsur penting dalam pendidikan tradisional orang Jawa (Magnis-Suseno, 1989). Etika Jawa menuntut agar orang bersedia untuk menerima (*narima*), suatu keadaan dimana orang Jawa mampu menerima hal-hal yang berat tanpa mengeluh, tidak memberontak apabila mengalami peristiwa tidak mengenakkan, paham bahwa banyak pengalaman hidup yang harus diterima, namun kuat dalam bertanggung jawab dan berani bertindak (Magnis-Suseno, 1997).

Dalam menjalankan etika yang demikian dalamnya, orang Jawa mempunyai dua prinsip etika yang

sangat membudaya, bahkan sudah diajarkan sejak kecil melalui pendidikan sosial dalam keluarga. Kedua prinsip etika tersebut akan dijabarkan di bawah ini dalam rangka menganalisis etika normatif model seperti apa yang ada dalam etika Jawa.

Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini merupakan kajian pustaka. Sumber yang digunakan merupakan kajian artikel-artikel ilmiah terutama tentang Etika Jawa dan beragam artikel yang dapat menjawab tujuan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan merupakan artikel ilmiah dengan reputasi dan buku-buku yang berkorelasi dengan judul artikel.

Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data yang di arahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2018).

Metode pengumpulan dan pengolahan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mengutip, menganalisis, dan membuat catatan serta merangkum permasalahan tentang Etika Jawa.

Hasil dan Pembahasan

Etika Jawa: Kerukunan dan Hormat

Dalam masyarakat Jawa, terdapat sebuah tatanan nilai penting yaitu agar tidak menimbulkan konflik. Konflik harus dihindari melalui serangkaian tingkah laku sehingga terciptalah keselarasan. Inilah yang disebut

kerukunan. Kemudian dalam bertingkah laku, khususnya ketika berbicara dan membawa diri, setiap orang harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai kedudukannya. Inilah yang disebut hormat. Kedua nilai ini sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang Jawa (dan bahkan seharusnya siapa saja) yang kemudian menjadi norma dalam masyarakat Jawa.

Kerukunan

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Keadaan ini disebut rukun. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dan saling membantu. Maka, suasana rukun tercipta ketika terdapat semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, saling bekerja sama, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat. Keadaan rukun diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, rukun tetangga, desa dan dalam setiap pengelompokan. Sebagai suatu tindakan, rukun merupakan tindakan menghilangkan ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap selaras dan baik. Rukun juga merupakan usaha terus-menerus untuk bersikap tenang satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Tujuan final prinsip kerukunan adalah menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat (Sumiyardana, 2016).

Dalam pelaksanaannya, rukun memiliki apa yang disebut tuntutan: pertama, dalam pandangan Jawa, maksud rukun bukan soal penciptaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada (menuntut

untuk mencegah kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat). Kedua, kerukunan tidak menyangkut sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan (Magnis-Suseno, 1984).

Bahkan dalam penelitiannya, Clifford Geertz mengaitkan kerukunan dengan *slametan*. Orang Jawa menyebut perkawinan dan khitanan dengan *duwé gawé* yang secara harafiah berarti mempunyai kerja dan menganggap sebagai contoh yang baik untuk sebuah nilai yang disebut rukun, yaitu kerja sama yang mentradisi (Geertz, 1960). Dari peristiwa *slametan*, orang akan selalu membangun tradisi bekerja sama dan tolong menolong, karena tidak ada seorang pun yang menghindarkan diri dari mengadakan *slametan* (Geertz, 1960).

Proses pembelajaran kerukunan

Pembelajaran setiap orang dalam bertata-krama terjadi dalam keluarga dengan dua tahap. Tahap pertama, ketika seorang anak berusia sampai dengan lima tahun di mana terdapat kesatuan yang akrab dan tanpa ada ketegangan dalam keluarga. Proses pembelajaran agar setiap anak memiliki pemahaman akan kerukunan yakni melalui pengulangan secara terus-menerus. Misalnya seorang anak dilatih secara berkelanjutan menggunakan tangan kanan, membiasakan anak berterima kasih dengan ungkapan *matur nuwun*, menghormati orang tua dengan ungkapan *mbah*. Atau seorang anak diberikan pelajaran bukan dengan mengancam namun melalui kisah magis di luar rumah yang menakuti mereka seperti roh jahat. Dengan pola seperti ini akan muncul ketergantungan yang akrab dari keluarga sendiri dan akan membuat sang anak peka terhadap reaksi-reaksi yang halus dari orang lain.

Tahap kedua, pembelajaran anak ketika melewati umur lima tahun. Pada tahap ini, seorang ayah lebih dominan dalam mendidik seorang anak Jawa, yang oleh ibu menempatkannya sebagai karakter luar sehingga anak harus merasa segan dan hormat pada ayahnya. Dengan adanya model pendidikan sosial pada tahap ini, seorang anak diharapkan mampu membawa diri dengan beradab dan mempelajari segala unsur tata krama yang diharapkan dari seorang yang didewasakan. Anak harus belajar merasa malu terhadap orang asing, takut akan rasa tidak enak, timbulnya perasaan malu dan bersalah ketika melakukan pelanggaran tata krama (Magnis-Suseno, 1984).

Proses tersebut akan menjadikannya orang dewasa Jawa yang mampu membatinkan kesejahteraan dan eksistensinya terhadap kelompoknya. Kesadaran akan tumbuh bilamana menentang kehendak orang lain secara langsung, akan menimbulkan permusuhan yang bertentangan dengan perasaannya. Orang dewasa Jawa mulai menyadari bahwa kelakuan yang berlawanan dengan prinsip kerukunan menimbulkan perlawanan psikis, sementara ketika terjadi keselarasan sosial akan memuaskan dan merasa nyaman. Maka secara psikologis, keadaan rukun mulai dipahami sebagai keadaan yang aman, tenang dan tidak terdapat perasaan negatif (Magnis-Suseno, 1984).

Bagaimana berlaku rukun?

Agar tidak muncul konflik karena tabrakan kepentingan, maka dalam bertindak, dituntut agar individu bersedia memomorduakan atau bahkan melepaskan kepentingan pribadi demi untuk kesepakatan bersama. Dalam perkembangannya, masyarakat Jawa mengembangkan norma-norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah

terjadinya emosi-emosi yang bisa menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai emosi-emosi yang melekat pada pertentangan secara terbuka. Norma ini menuntut untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi-emosi. Selain itu, norma ini juga menuntut untuk selalu bersikap tenang, untuk tidak menjadi bingung, untuk tidak menunjukkan rasa kaget atau bingung. Secara khusus orang Jawa, ketika dalam berbicara, dalam segala tindak-tanduknya agar selalu memperhatikan reaksi-reaksi semua orang dan agar ia selalu berlaku sedemikian rupa sehingga tidak muncul pertentangan. Jadi ketika berbicara di depan umum, hendaknya berbicara dengan suara yang tenang, tanpa emosi sehingga pendengar merasa nyaman dan tidak konfrontatif. Atau misalnya suatu pernyataan dibuka dengan rumusan seperti, 'saya rasa' (*raos kula*) atau 'barangkali' (*mbok menawi*). Bagi orang Jawa, demi tujuan apa pun, usaha-usaha yang berlebihan tidak disukai. Hal ini akan menimbulkan reaksi yang memperlihatkan kekacauan batin atau tidak terasa enak (Magnis-Suseno, 1984).

Dalam berlaku rukun, orang harus hati-hati ketika kepentingan yang berlawanan saling berhadapan. Misalnya ketika ada permintaan, maka tidak boleh langsung ditolak dengan kata *mboten*. Sebaliknya jawaban yang tepat adalah *inggih*, perkara apakah si peminta menafsirkan penerimaan atau penolakan. Misalnya ketika ritual lamaran orang Jawa dengan kondisi tidak menerima, namun dengan cara yang sangat hati-hati. Biasanya orang tua wanita akan memberikan alasan bahwa anak mereka sudah tidak segar lagi dan walaupun sudah dewasa namun masih kekanak-kanakan dan hanya akan menimbulkan kesulitan jika menjadi anak mantu. Dengan adanya teknik seperti ini, kedua

belah pihak memperoleh kemungkinan untuk mundur tanpa perlu menolak secara langsung. Dari penolakan tersebut akan nampak seperti ungkapan perhatian yang ditujukan kepada kepentingan keluarga pihak lain. Maka dengan demikian, pihak keluarga yang lainnya jika mulai ragu akan mundur secara teratur tanpa menimbulkan konflik sama sekali (Magnis-Suseno, 1984).

Salah satu keutamaan orang Jawa adalah kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak enak secara langsung dengan teknik halus. Hal-hal yang kasar bukanlah watak yang terpuji, ketika orang sampai pada maksud sesungguhnya dalam suatu model percakapan priyayi yang baik, setiap orang sudah harus menyadari apa yang hendak dikatakan oleh lawan bicara. Bahkan sering kali orang tidak perlu mengutarakan secara langsung maksud pembicaraan dan ini melegakan bagi kedua pihak yang berbicara. Salah satu teknik lain agar orang lain tidak kecewa adalah apa yang disebut berpura-pura atau *ethok-ethok*. Melalui teknik yang tinggi dan positif ini, orang tidak langsung menampakkan perasaan yang sebenarnya terutama yang negatif. Misalnya ketika diliputi kesedihan mendalam, harus nampak tersenyum, atau ketika kedatangan orang yang dibenci, harus tetap harus gembira. *Ethok-ethok* ini bertujuan agar keakraban tetap ada meskipun perasaan sebaliknya disembunyikan. Selain itu, kebiasaan *ethok-ethok* ini merupakan kebiasaan untuk memberi jawaban yang tidak tepat karena menyangkut privasi. Mengapa demikian? Karena si penanya sendiri sebenarnya tidak mengharapkan jawaban sebenarnya dan tidak ingin mencampuri urusan orang lain melainkan merupakan bentuk perhatian saja. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada

kewajiban untuk saling membantu, orang Jawa berusaha untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain karena dapat menimbulkan emosi dan konflik (Magnis-Suseno, 1984).

Apa yang dilakukan agar konflik tidak muncul? Sarana untuk mencegah timbulnya konflik adalah tata krama Jawa. Tata krama ini mengatur semua bentuk interaksi langsung di luar keluarga inti dan teman-teman yang akrab, yang menyangkut gerak badan, urutan duduk isi dan bentuk pembicaraan. Tata krama Jawa ini paling baik dilihat dalam bahasa Jawa, dimana pembicaraan di antara orang-orang beradab harus dijalankan dalam bentuk krama (Purwadi, 2011).

Inti Prinsip Kerukunan

Prinsip kerukunan mempunyai tempat yang istimewa dalam masyarakat Jawa. Inti prinsip tersebut adalah dengan adanya kerukunan, konflik terbuka dapat dihindari sehingga tercipta keselarasan sosial, tercipta keadaan yang rukun, dan berdamai satu dengan yang lain. Namun sikap rukun tidak berarti bahwa terdapat kesediaan hati untuk memorduakan kepentingan dan hak-hak pribadi terhadap orang lain atau kelompok. Rukun tidak dapat dimaknai sebagai tenggelamnya individu dalam kelompok. Sebaliknya, orang Jawa sangat menyadari diri sebagai individu, memiliki masalah individu serta kepentingan pribadi, dan sejauh melalui prinsip kerukunan, orang Jawa akan sekuat tenaga untuk dapat mengkodisikan dan memenangkannya. Maka otonomi pribadi sangat dijunjung tinggi, sehingga seseorang tidak akan senang ketika orang lain mencampuri masalah pribadinya.

Singkatnya, prinsip kerukunan yang dimaksud sejatinya suatu mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-

kepentingan itu demi kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, kerukunan sebagai suatu *modus vivendi* keras yang tercapai melalui suatu proses pemberian dan penerimaan antara orang-orang yang menguskakan kepentingannya sendiri-sendiri (Magnis-Suseno, 1984). Meskipun demikian, ada kalanya prinsip kerukunan itu ambruk dalam pribadi seseorang. Sangat manusiawi, orang Jawa dapat meluapkan emosionalnya dengan sangat hebat ketika batas kemampuan untuk menerima itu telah ambruk.

Hormat

Prinsip hormat dapat dimaknai bahwa setiap orang dalam berbicara dan membawa diri harus menunjukkan sikap yang hormat terhadap orang lain, tentu sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Dengan kata lain, dimana terjadi pertemuan antara dua orang Jawa, maka bahasa, pembawaan diri dan kelakuan mereka harus menunjukkan tanda pengakuan terhadap kedudukan mereka (Purwadi, 2011). Memang bahwa terkesan teratur secara hierarkis, namun keteraturan ini bernilai sehingga setiap orang wajib mempertahankannya. Mereka yang lebih tinggi kedudukannya harus diberikan hormat, sementara yang lebih rendah kedudukannya sikap yang diberikan yakni sikap kebapaan, sikap keibuan dan sikap rasa tanggung jawab. Jika terjadi hal di mana ada saling hormat, maka setiap orang dapat menyadari tempat dan tugasnya sehingga mampu menjaga agar tercipta suatu kesatuan yang selaras dalam masyarakat (Magnis-Suseno, 1984).

Bagaimana mendapatkan pendidikan hormat?

Sama seperti prinsip kerukunan, sikap hormat dikembangkan pada orang

Jawa sejak kecil melalui pendidikan keluarga. Pendidikan yang dialami seorang anak kecil dengan sendirinya akan tercapai melalui tiga perasaan: *wedi*, *isin*, dan *sungkan* (Magnis-Suseno, 1984). *Wedi* dimaknai sebagai perasaan takut sebagai reaksi terhadap ancaman fisik dan akibat kurang enak akan suatu tindakan. Proses pendidikan sosial dimulai dari tahap ini, di mana seorang anak Jawa merasa *wedi* terhadap orang yang sepatutnya dihormati. Anak yang mampu bersikap *wedi* tentunya mendapat pujian.

Setelah itu, barulah kemudian masuk pada tahap pendidikan *isin*. *Isin* dapat dimaknai sebagai sifat malu, malu-malu, atau merasa bersalah. Ketika seorang anak telah belajar untuk merasa malu (*ngerti isin*), inilah periode paling penting sebagai langkah pertama menuju kepribadian yang matang sebagai orang Jawa. Sementara yang belum bisa memahami rasa malu (*ora ngerti isin*) yang dapat dimaknai sebagai sifat yang tidak tahu malu, tentu menjadi penilaian negatif sebagai suatu kritik dan bisa dikatakan belum mengarah pada kepribadian yang lebih matang. *Isin* dapat pula dimaknai sebagai satu kesatuan dengan hormat. Jadi orang akan merasa *isin* jika tidak mampu memberikan tindakan hormat kepada orang yang sepatutnya dihormati.

Berbeda dengan *wedi* dan *isin*, pendidikan orang Jawa dalam hal *sungkan* berlangsung secara terus menerus. *Sungkan* agak mirip sedikit dengan *isin*, namun *sungkan* dimaknai sebagai perasaan malu yang lebih positif. Lebih tepatnya, *sungkan* itu merupakan rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau orang lain yang belum dikenal sebagai pengekanan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain (Magnis-Suseno, 1984). Ketika seseorang dapat memahami makna *wedi*, *isin*, dan

sungkan, setidaknya orang tersebut juga telah mengerti dan tahu bagaimana membawa diri, matang, dan menjadi orang Jawa sepenuhnya.

Bagaimana berlaku hormat?

Dalam menaruh rasa hormat kepada orang lain, dapat ditemukan dalam tata cara berbicara orang Jawa. Dari segi tata bicara, bahasa Jawa sendiri terdiri dari dua tingkatan utama yaitu bahasa *krãmå* dan *ngoko*. Bahasa *krãmå* dipergunakan dalam rangka memberikan rasa hormat, sementara bahasa *ngoko* dipergunakan untuk menyatakan keakraban (Magnis-Suseno, 1984). Dalam bahasa Jawa tidak terdapat kemungkinan untuk menyapa orang lain dan berbicara berhadapan dengannya tanpa menunjukkan bagaimana kita memosisikan kedudukan sosial dengan lawan bicara. Ketika menyapa orang lain, orang Jawa mempergunakan istilah-istilah dari bahasa keluarga yang selalu mempunyai implikasi senior dan junior atau yang lebih tua dan lebih muda.

Ketika berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka yang dipergunakan adalah istilah senior dan sebaliknya jika berbicara dengan orang yang kedudukannya lebih rendah, dipergunakan istilah junior. Misalnya menyebut laki-laki yang lebih tua dengan *mbah* (kakek) atau *pak*; menyebut laki-laki yang seumuran dengan *kak* atau *kang*; dan yang lebih muda dipanggil *dhik*. Menyebut wanita yang lebih tua dengan *mbah* (nenek) atau *mbok*; menyebut wanita yang seumuran dengan *mbak* (kakak perempuan); dan yang lebih muda dipanggil *dhik*.

Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam struktur bahasa Jawa sendiri memang telah tertanam indikator status sosial sehingga pola pembicaraan dengan tua dan muda atau senior dan

junior dapat terlaksana. Ketika berbicara dengan orang lain, orang Jawa pada umumnya memahami bahwa tingkatan kehormatan yang mana yang akan ditunjukkan kepada lawan bicaranya. Tidak mungkin bagi orang Jawa untuk berbicara dalam bahasa Jawa tanpa mengacu pada tinggi-rendahnya kedudukan (sosial) lawan bicara terhadap kedudukan pembicara. Meskipun terdapat gradasi yang begitu banyak dan rumit, kemampuan untuk pemilihan dan mengaplikasikan kata mencerminkan kedudukan, keakraban, umur, jarak sosial dan pangkat pembicara (Magnis-Suseno, 1984).

Dalam penelitiannya di Jawa, Hildred Geertz mencotohkan bagaimana prinsip hormat ini berlaku namun sekaligus rumit (Magnis-Suseno, 1984). Diceritakan bahwa terdapat seorang anak dua belas tahun tidak menerima ketika harus menyebut ponakannya yang berumur dua tahun dengan sebutan *mbah*. Anak ini harus memanggil *mbah* secara *krāmā* karena anak dua tahun ini merupakan generasi orang tuanya. Anak tersebut kemudian diizinkan oleh sang ibunya untuk memanggil anak dua tahun tersebut memakai bahasa *ngoko* dengan memakai sebutan *mbah cilik* (kakek kecil). Bahasa yang dipakai adalah bahasa tipe *ngoko*, diharapkan kedua anak ini dapat akrab, dan di sisi lain terdapat pula unsur bahasa *krāmā* untuk tetap memastikan ada pula unsur penghormatan.

Inti Prinsip Hormat

Prinsip hormat tidak mencakup sikap batin melainkan kelakuan dalam masyarakat. Prinsip hormat bukanlah sikap yang memberi perintah dan dipatuhi, tetapi lebih kepada mendengarkan dengan hormat untuk kemudian dilaksanakan. Dalam prinsip hormat, cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat

sesuai derajat dan kedudukannya. Bagi orang Jawa, sikap yang bagus dan beradab adalah sikap yang halus yang mencakup kelembutan, kehalusan, keanggunan, dan keluwesan. Sikap yang halus ini menunjukkan penguasaan tingkatan bicara dalam bahasa Jawa sembari menyadari diri dan orang lain (Sumiyardana, 2016).

Kesimpulan

Motivasi untuk bertindak rukun bersifat ganda: di satu pihak individu berada dalam tekanan dari pihak lingkungannya yang mengharap agar bersikap rukun, namun di lain pihak, individu membatinkan tuntutan kerukunan sehingga ia merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan (Magnis-Suseno, 1984). Prinsip kerukunan memberi kemungkinan bagi orang Jawa untuk memperlihatkan suatu sikap sosial tanpa sekaligus harus merelakan kepentingan-kepentingan pribadi dalam hati (Magnis-Suseno, 1984).

Demikian pula dengan sikap hormat, prinsip ini tidak mengenai sikap batin, melainkan kelakuan dalam masyarakat. Prinsip ini lebih pada bagaimana menunjukkan sikap hormat atas pengakuan senioritas dalam sikap lahiriah, bukan karena kita merasa hormat terhadap atasan atau yang lebih tinggi kedudukannya. Maka, keliru ketika mengambil kesimpulan dari sikap tunduk orang Jawa sebagai ungkapan berikan perintah maka akan dilaksanakan, karena sikap hormat bukanlah jaminan terlaksananya suatu perintah atau jaminan atas ketaatan.

Menurut penulis, orang Jawa yang mampu melaksanakan prinsip kerukunan dan hormat ini, secara tidak langsung telah mengarahkan dirinya pada hal-hal yang bernilai dan mempunyai nilai tanggung jawab

sebagai manusia. Dengan bersikap hormat dan berlaku hormat, orang Jawa telah mengambil tempatnya sendiri, bagaimana menempatkan dirinya dan berlaku tulus di antara orang lain yang memberikan kepuasan dan keselarasan di dalam dirinya (*sepi ing pamrih*). Dengan kedua prinsip ini pula, orang Jawa mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat dan kelompoknya yang memberikan suatu keselarasan di luar dirinya (*rame ing gawe*). Kemampuan tersebut merupakan kemampuan untuk mengolah rasa atau merasakan berbagai dimensi hidup sehingga mampu bertindak untuk memilih yang baik dan benar. Maka relevansi bagi pewarta pastoral dan katekese, kemampuan merasa ini merupakan nilai dan sikap moral dasar orang Jawa yang patut dicontoh.

Sebagai penutup tulisan ini, penulis mencoba melihat etika Jawa ini dalam perbandingan dengan etika teleologis Aristoteles dan etika deontologis Immanuel Kant. Etika Jawa menurut penulis, adalah etika yang searah dengan etika teleologis; dan tidak searah dengan etika deontologis. Etika teleologis merupakan suatu tindakan yang dikatakan benar secara moral jika akibat dari tindakan itu baik dan tindakan dikatakan salah jika akibatnya tidak baik (Dardiri, 1993; Magnis-Suseno, 2009). Salah satu keutamaan orang Jawa adalah kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak enak secara langsung dengan teknik halus. Teknik agar orang lain tidak kecewa adalah berpura-pura (*ethok-ethok*). Tindakan bohong ini dilakukan agar tercipta keharmonisan, sehingga dibenarkan menurut etika teleologis. Maka dapat dikatakan tindakan *ethok-ethok* adalah etika teleologis, berbuat bohong supaya orang lain tidak marah.

Sementara etika deontologis merupakan suatu tindakan yang diukur

benar atau salah secara moral bukan karena akibatnya baik atau tidak baik namun dari tindakannya itu (Suryosumunar, 2022). Dalam hal ini, etika Jawa yang dilandasi sikap *ethok-ethok* tidak dapat dikategorikan sebagai etika deontologis, karena secara prinsip, tindakan bohong tidak dapat dibenarkan. Secara moral, berpura-pura merupakan tindakan bohong atau tidak jujur, meskipun demi untuk menghindari konflik. Relevansinya bagi pendidikan agama Katolik, yakni larangan berbohong sebagaimana dalam 10 Perintah Allah merupakan suatu aturan mutlak dan kewajiban. Tindakan berbohong di lingkungan manapun merupakan tindak penghapusan martabat seseorang sebagai makhluk manusiawi (Rachels, 2003).

Bibliografi

- Dardiri, A. (1993). Etika Pengembangan Diri Menurut Aristoteles. *Jurnal Filsafat, Seri 16 No*, 29–34.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. The University of Chicago Press.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya-Kajian Sejarah Terpadu*. Gramedia.
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Gramedia.
- Magnis-Suseno, F. (1989). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2009). *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles*. Kanisius.
- Purwadi. (2011). Etika Komunikasi dalam Budaya Jawa. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(3)*, 239–249.

Rachels, J. (2003). *The Elements of Moral Philosophy* (IV). McGraw-Hill.

Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumiyardana, K. (2016). *Etika Jawa dalam Novel Indonesia*. Balai Bahasa Jawa Tengah.

Suryosumunar, J. A. Z. F. N. (2022). Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Perspektif Etika Deontologi Immanuel Kant. *Sanjiwani Jurnal Filsafat*, 13 Nomor 2.

Copyright holder :

Mathius Tukan Panggelo (2023).

First publication right :

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

This article is licensed under:

